



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YEKA HENDRA FATIKA
2. Jabatan : ANGGOTA OMBUDSMAN RI
3. NHK : 860687

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m ² /195 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m ² /145 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	361.000.000
1. MOBIL, CHEVROLETE MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. MOTOR, SUZUKI MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
3. MOBIL, NISSAN TEANA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
4. MOTOR, PULSAR PULSAR 200 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	226.080.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	43.129.250
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.074.141
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.150.283.391
III. HUTANG	Rp.	800.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.350.283.391

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.